

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah berawal dari pemanfaatan segala potensi yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu pembangunan suatu daerah lebih mengarah kepada setiap daerah untuk mengatur peraturan rumah tangganya sendiri. Pengelolaan sumber daya yang ada dalam sektor masyarakat bertujuan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang dapat memberikan dampak dalam wilayah tersebut. Dimana dalam pembangunan suatu daerah dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri dan luar negeri.¹

Berikut ini sumber keuangan/pendapatan negara dari dalam negeri dan luar negeri yaitu pajak, retribusi, keuntungan dari BUMN atau BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjam uang, penyelenggaraan undian berhadiah.

¹ Jovanly Ateng, dkk "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Manado tahun 2011-2015, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No.04 Tahun 2016, Hlm. 48

Sedangkan sumber keuangan negara dari luar negeri yaitu : pinjaman program, pinjaman proyek, sumbangan, hadiah dan hibah².

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Asas-asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yaitu : Asas domisili atau tempat tinggal, asas sumber dan asal kebangsaan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.³

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan kontribusi pajak di gunakan sebagai; Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti: pengeluaran yang bersifat self liquidating, contohnya: pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor; Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti: pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya: pengeluaran untuk pengairan dan pertanian; Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquidating dan tidak reproduktif, contohnya: pengeluaran untuk pendirian

² <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/sumber-keuangan-negara.html>, 10 Sumber Penerimaan Negara Dalam APBN, dari Dalam dan Luar Negeri, Diakses pada tanggal 13 Mei 2019

³ <https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara>, Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara, Diakses pada 09 Mei 2019

monumen dan objek rekreasi; Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya: pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu.⁴

Penerimaan Negara Indonesia terbesar berasal dari sektor perpajakan. dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, karna pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap APBN. Dilihat dari 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018 penerimaan Negara dari perpajakan terus meningkat dimana pada Tahun 2016 mendapat 1.285,0 triliun, tahun 2017 mendapat 1.472,7 Triliun dan Tahun 2018 mendapat 1.618,1 Triliun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin baik dari tahun ke tahun Perbaikan pertumbuhan Pendapatan Negara tersebut terjadi di semua komponen Perpajakan, semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin besar juga penerimaan pajak yang didapat Negara.⁵

Berdasarkan contoh kasus salah satu di indonesia peran kontribusi pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terdapat di daerah kabupaten Sidoarjo yaitu kontribusi pajak daerah dapat di nikmati oleh masyarakat sebagai gantinya dari pemerintah guna memberikan fasilitas penunjang kebutuhan oleh masyarakat, anggaran dari kontribusi pajak daerah

⁴ <https://www.kompasiana.com/dnayire/5c35d0196ddcae3d7c7571a4/pajak-untuk-pembangunan-negara>, Eriyand Shohihul Islam, *Pajak untuk Pembangunan Negara*, Diakses pada 09 Januari 2019

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/> Kementerian keuangan republik indonesia, *APBN 2018*, Diakses pada 24 maret 2019

di kabupaten sidoarjo di pergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Berdasarkan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa panjang jalan di Kabupaten Sidoarjo totalnya mencapai 1.411,797 Km yang terdiri dari 18 kecamatan.⁶

Berdasarkan contoh kasus di Kota Kediri Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Kediri adalah pajak daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Salah satunya pajak yang dibebankan pada pungutan di kota Kediri yaitu pajak reklame.⁷

Mengenai produk hukum yang mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah di kota Kediri di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) tentang pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame yang berbunyi “Menunjuk Kepala DPPKA yang bertanggung jawab terhadap ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6

⁶ Syuhada Sofian, 1997, Prospek dan Alternatif “Action Plan” Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang, Gema Stikubank, Semarang.

⁷ Syuhada Sofian, 1997, Prospek dan Alternatif “Action Plan” Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang, Gema Stikubank, Semarang.

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah”. Sedangkan penegak hukum yang berwenang apabila terdapat pelanggaran maka petugas yang menindaklanjuti hal tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 16 huruf g.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang 28 tahun 2009 telah diberlakukan terhitung mulai 1 Januari 2009 yang mengatur tentang Pajak Reklame terdapat pada pasal 47 ayat (2) yang menyatakan jenis-jenis objek Pajak reklame : Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, Reklame kain, Reklame melekat, stiker, Reklame selebran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide dan Reklame peragaan.⁸

Berdasarkan contoh kasus pada tahun 2017 di Kota Kediri telah terjadi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri dari pajak reklame tahun ini turun drastis. Pemerintah Kota Kediri terpaksa menurunkan target, dari Rp 1,9 miliar menjadi Rp 1 miliar lebih. Menurunnya pendapatan dari sektor ini, menurut Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Heri S Putra, disebabkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI nomor 20 tahun 2010 tentang tata ruang. “Dalam aturan itu, reklame yang melintang di badan jalan dilarang. Kalaupun masih ada yang terpasang, itu karena soal izin yang belum selesai. Hingga saat ini, tarifnya masih belum berubah,” kata Heri pada wartawan, kemarin. Guna meningkatkan pendapatan dari reklame, salah

⁸ Krishna Yuliadi, “Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 5 No.4, Tahun 2017 Hal. 16

satunya caranya dengan menaikkan tarif. Hanya saja, hal itu harus ada perubahan Perwali yang baru untuk merubah tarif.

Dari data BPPKAD Kota Kediri, rincian target pajak reklame Kota Kediri di PAK tahun ini, pajak reklame videotron turun, dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 795 juta. Reklame kain dari Rp 140 juta menjadi Rp 50 juta. Reklame melekat atau stiker, dari Rp 7 juta menjadi Rp 2 juta. Yang tidak berubah adalah target reklame berjalan, yakni Rp 240 juta. Dari sekian banyak target pajak reklame, hingga Juni lalu, Pemkot Kediri baru meraih Rp 503 juta lebih. Sebelumnya, DPRD Kota Kediri meminta agar Pemkot memaksimalkan PAD dari pajak dan retribusi.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Penulis bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai **“Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri Dan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemasangan reklame di kota kediri ditinjau dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 dan peraturan walikota nomor 7 tahun 2013?
2. Bagaimana dasar perhitungan pajak reklame di kota kediri ?
3. Bagaimana efektifitas pembayaran pajak reklame di kota kediri ?

⁹ <https://www.bangsaonline.com/berita/38982/perolehan-pajak-reklame-pemkot-kediri-merosot>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat Mengetahui prosedur pemasangan reklame yang benar dan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Mengetahui dasar-dasar perhitungan pajak reklame di Kota Kediri
3. Mengetahui efektifitas pembayaran pajak reklame di kota kediri
4. Mengetahui faktor penyebab penurunan pendapatan daerah Kota Kediri dari pajak reklame

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan wawasan ilmu penegetahuan hukum tentang pendapatan asli daerah dari sumber penerimaan pajak khususnya pajak reklame pada umumnya
- 2) Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam ruang lingkup studi hukum tentang pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame pada umumnya dan/atau lebih khususnya terhadap pelaku pajak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah diharapkan dijadikan

sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dengan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame

- 2) Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pentingnya pembayaran pajak untuk kepentingan bersama
- 3) Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh sumber data dari penerimaan pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan. Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi pertama yaitu di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Kediri Jawa Timur yang beralamat di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor. 97 Kota Kediri. Lokasi penelitian kedua yaitu Kantor Polisi Pamong Praja yang beralamat di Jl. Veteran Nomor. 08 Kota Kediri. Alasan menjadikan kedua lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena instansi yang dituju memiliki kewenangan sebagaimana tugasnya dalam penegakan hukum dan perizinan terhadap pajak reklame di kota kediri, dan pengmabilan data

¹⁰ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Rajawali Press, 2003)

sample data Reklame di Jl. Veteran Kota Kediri, Jl. Mayor Bismo Kota Kediri dan Jl. Mojoroto Kota Kediri.

3. Sumber Data

Sumber data adalah data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber data meliputi, sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun sumber data tersebut yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan responden di lokasi penelitian yang sekiranya mempunyai informasi mengenai fokus pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti dan studi kepustakaan, yaitu tentang pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak reklame.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penejasan mengenai sumber data primer, yang mencakup :

1. Buku-buku yang berkaitan dengan tema peneitian, yaitu tentang Pemungutan pajak rekame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah
2. Jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian;
3. Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian terdahulu;

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih. Wawancara penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan responden yang mengetahui permasalahan maupun yang terlihat langsung dalam masalah (tokoh adat). Wawancara dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame di Kota Kediri

Wawancara ini dilakukan terhadap responden yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ibu Mei Wuryandari, S.E, M.Sos selaku Kasie Bagian Umum Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri, pada tanggal 20 April 2019
- 2) Ibu Rukyati S. Sos, selaku Kasie Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, pada tanggal 12 April 2019

- 3) Edy Laksmna (Toko Sahabat Baru) Pengguna reklame
Bilboard/Papan nama di jalan Joyoboyo 56 Kota Kediri

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan baik itu catatan transkrip, buku, surat kabar, agenda, dll.¹¹ Dalam penelitian ini adapun data yang dapat di kumpulkan melalui metode dokumentasi yaitu :

- 1) Data tingkat efektif pembayaran pajak reklame di kota Kediri yang di dapatkan dari Badan pendapatan pengelola keuangan dan aset Kota Kediri.
- 2) Data Rincian efektivitas pajak reklame beberapa Jalan di Kota Kediri yang di dapatkan dari Badan pendapatan pengelola keuangan dan aset Kota Kediri.
- 3) Data pembayaran pajak Reklame yang di dapatkan dari Badan pendapatan pengelola keuangan dan aset Kota Kediri.

c. Observasi

Observasi merupakan yang dilakukan dalam suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan

¹¹ Drs. Margono S “*Metode pendidikan komponen MKDK*”, PT. Rineka cipta Jakarta tahun 2007

informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹²

Dalam penelitian ini observasi untuk mendapatkan data gambar/foto reklame yang terpasang di beberapa jalan di Kota Kediri, lokasi pengambilan gambar atau foto reklame yaitu :

- 1) Jl. Veteran Kota Kediri
- 2) Jl. Mayor bismo Kota Kediri
- 3) Jl. Mojoroto Kota Kediri

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bacaan baik berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame, dan bahan bacaan lain yang dapat memberikan dukungan teori terkait permasalahan dalam penelitian.

5. Analisa Data

Untuk memecahkan permasalahan pada topik yang dibahas, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sehingga dapat digunakan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan Studi Kepustakaan, kemudian disusun dan di

¹² <https://www.id.m.wikipedia.org/penjelasan-tentang-observasi>, Diakses pada 21 Juli 2019

lakukan pengolahan data. Sehingga menghasilkan sajian data yang dijadikan kesimpulan dan dapat di pahami mengenai “Anailisi penerapan Prinsip Keadilan Dan Prinsip Kepastian Hukum Pada Dasar Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri Dan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Di Kota Kediri)”

F. Sistematika Penelitian

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang
- BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian yang berupa observasi dan wawancara yang kemudian dianalisa secara sistematis berdasarkan pada tinjauan pustaka sebagaimana terdapat di BAB II.
- BAB IV : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai

rekomendasi berdasarkan teman-teman yang diperoleh
dalam penelitian.

